

COORDINATION ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SINJAI

Mursak¹, Juanda Nawawi² & Muh. Tang Abdullah³

¹ Lecturer at Muhammadiyah University of Sinjai

E-mail: mursak.ucca@gmail.com

² Lecturer in Public Administration, Hasanuddin University

E-mail: juandanawawi1808@gmail.com

³ Lecturer in Public Administration, Hasanuddin University

E-mail: mtapublikunhas@gmail.com

Abstrak

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan melalui peningkatan PAD dan berkembangnya destinasi berbasis alam dan komunitas. Namun, efektivitas pengelolaannya masih menghadapi tantangan koordinasi antar-stakeholder, terutama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan lembaga pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk koordinasi, faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan model koordinasi yang sesuai dalam pengembangan pariwisata daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi masih bersifat administratif dan sporadis, ditandai rapat tanpa tindak lanjut, komunikasi yang belum inklusif, serta sinergi program yang terbatas antar OPD dan komunitas. Kapasitas kelembagaan, kepercayaan sosial, dan kepemimpinan kolaboratif menjadi faktor penentu keberhasilan koordinasi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum kolaboratif permanen lintas sektor dan penguatan kapasitas desa wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan partisipatif di Kabupaten Sinjai.

Kata kunci: Governance Pariwisata; Kolaborasi Multi Aktor; Desa Wisata

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena kemampuannya mendiversifikasi basis perekonomian, menyerap tenaga kerja, serta mendorong *multiplier effect* terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Kabupaten Sinjai (Provinsi Sulawesi Selatan) memiliki modal sumber daya alam dan budaya yang potensial misalnya ekosistem mangrove Tongke-Tongke, air terjun, dan pulau-pulau pesisir yang telah menjadi fokus program pengembangan pariwisata daerah dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi menunjukkan bahwa statistik dasar Kabupaten Sinjai dan indikator pariwisata tercatat dalam publikasi *Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2024*, sementara dokumen perencanaan daerah (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah/RIPPDA) menjadi landasan hukum dan kebijakan pengembangan destinasi hingga 2033. Kedua dokumen ini menegaskan adanya komitmen formal pemerintah daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan (B. P. S. K. Sinjai, 2024).

Secara operasional, capaian pendapatan daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga menunjukkan tren peningkatan pada beberapa periode terakhir misalnya realisasi retribusi dan pendapatan di triwulan dan periode liburan tertentu yang dilaporkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dan media lokal pada 2023–2024 menandakan bahwa potensi kunjungan dan kegiatan ekonomi terkait pariwisata mulai memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu diiringi oleh tata kelola kolaboratif antar-pemangku kepentingan yang optimal; berbagai laporan dan kajian awal menunjukkan tantangan koordinasi antarinstansi pemerintahan, komunitas lokal, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berimplikasi pada fragmentasi kebijakan dan implementasi program (D. P. dan K. K. Sinjai, 2024).

Koordinasi antar-stakeholder (*inter-stakeholder coordination*) dalam konteks pengelolaan pariwisata merujuk pada mekanisme, struktur, dan praktik yang memungkinkan berbagai aktor (pemerintah pusat/daerah, pemerintah desa, komunitas lokal, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan LSM) untuk melakukan tindakan kolektif, berbagi informasi, mengharmonisasikan kebijakan, serta menyepakati pembagian peran dan manfaat. Literatur internasional mutakhir menekankan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan sangat bergantung pada kualitas koordinasi multi-aktor; kegagalan koordinasi sering menimbulkan duplikasi program, konflik penggunaan sumber daya, serta distribusi manfaat yang timpang. Kajian *scoping review* dan studi empiris 2023–2025 menekankan pula pentingnya mekanisme *governance* berbasis jaringan multi-aktor (*multi-stakeholder partnerships*) untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pariwisata, terutama pada destinasi yang berada di kawasan konservasi atau komunitas pesisir.

Di Kabupaten Sinjai, berbagai inisiatif seperti pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), BUMDes yang mengelola usaha pariwisata, serta kegiatan konservasi mangrove telah menunjukkan kapasitas komunitas untuk berkolaborasi. Namun, analisis awal dokumen perencanaan dan praktik lapangan mengindikasikan adanya celah koordinasi: kebijakan daerah sering bersifat sektoral (terkotak-kotak), mekanisme forum koordinasi belum terinstitusionalisasi secara permanen, dan sinkronisasi antara rencana kabupaten dengan rencana tingkat desa belum selalu konsisten. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antar-aktor diorganisasikan, instrumen koordinasi apa yang efektif, serta bagaimana model koordinasi tersebut berdampak pada hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan pariwisata di Kabupaten Sinjai (P. K. Sinjai, 2023).

Berdasarkan kondisi empiris dan kajian literatur, permasalahan utama penelitian ini dirumuskan adalah bagaimana bentuk dan tingkat koordinasi antar-stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai dan Faktor struktural, institusional, dan sosial-kultural apa saja yang mempengaruhi efektivitas koordinasi antar-stakeholder tersebut serta Bagaimana korelasi antara mekanisme koordinasi dengan hasil pembangunan pariwisata (ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, dan konservasi lingkungan)?

Mursak¹, Juanda Nawawi² & Muh. Tang Abdullah³

Tinjauan Singkat Literatur Terkini

Studi-studi terkini tentang *governance* pariwisata menyoroti pentingnya jaringan kolaboratif yang melintasi batas sektor (*cross-sectoral collaboration*) dan tingkat pemerintahan (*vertical integration*). *Scoping review* 2024 tentang *multi-stakeholder partnerships* pada kawasan lindung menemukan bahwa kriteria keberhasilan meliputi: legitimasi partisipan, mekanisme akuntabilitas, sumber pendanaan bersama, serta kapabilitas fasilitator/koordinator. Penelitian lain 2023-2025 menekankan bahwa model koordinasi yang bersifat *polycentric* dan adaptif lebih efektif dibandingkan struktur hierarkis tunggal dalam menangani ketidakpastian dan tekanan lingkungan di destinasi wisata alam dan pesisir. Di Indonesia, studi-studi kasus terakhir mengindikasikan bahwa inkonsistensi antara kebijakan kabupaten dan implementasi desa menjadi hambatan utama bersifat institusional. Literatur ini memberikan kerangka teoretis bagi penelitian untuk menelaah dimensi struktural (instrumen kebijakan), proses (mekanisme koordinasi), dan agen (kepemimpinan lokal dan modal sosial).

Gap Penelitian

Walaupun terdapat sejumlah kajian tentang *governance* dan *multi-stakeholder partnerships*, penelitian yang secara spesifik mengkaji koordinasi antar-stakeholder dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai masih sangat terbatas. Gap penelitian yang hendak diisi meliputi:

1. Kekurangan studi kontekstual tingkat kabupaten: mayoritas penelitian *governance* pariwisata berskala nasional atau fokus pada kawasan konservasi besar; studi yang mendalami dinamika koordinasi pada kabupaten menengah seperti Kabupaten Sinjai masih minim. (P. K. Sinjai, 2023).
2. Keterbatasan analisis mekanisme koordinasi formal dan informal secara terintegrasi: sedikit penelitian yang menggabungkan analisis peraturan daerah (sebagai struktur formal) dengan praktik jaringan sosial dan budaya lokal (sebagai struktur informal) dalam satu kerangka analisis.
3. Minimnya bukti empiris terhadap hubungan koordinasi-*outcome*: masih jarang studi yang menguji bagaimana variasi mekanisme koordinasi berdampak langsung terhadap indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan pada destinasi lokal.

Kebaruan (Novelty) Penelitian

Penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dan empiris sebagai berikut:

1. Pendekatan integrative, mengkombinasikan analisis kebijakan (peraturan daerah dan rencana induk pariwisata), jejaring aktor (*social network analysis*), dan evaluasi *outcome* (indikator ekonomi, partisipasi, dan konservasi) dalam satu studi kasus kabupaten.
2. Fokus pada model koordinasi yang adaptif, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan kondisi koordinasi, melainkan menguji efektivitas alternatif mekanisme koordinasi (forum *multi-stakeholder* permanen, mekanisme kontrak sosial tingkat desa, dan skema pendanaan kolaboratif) yang relevan di Kabupaten Sinjai.

3. Penekanan pada aspek kultural, memasukkan variabel nilai sosial tradisional (misalnya gotong-royong, norma masyarakat pesisir Bugis) sebagai faktor moderasi yang memengaruhi efektivitas koordinasi formal.

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini bersifat ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian menutup celah empiris mengenai *governance* pariwisata pada tingkat kabupaten yang memiliki dinamika sosio-kultural khas. Secara praktis, temuan penelitian penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat memperkuat mekanisme koordinasi antar-stakeholder sehingga program pengembangan pariwisata Kabupaten Sinjai mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang inklusif, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengurangi konflik sosial. Mengingat komitmen daerah yang tertuang dalam RIPPDA dan indikasi peningkatan PAD dari sektor pariwisata pada 2023–2024, kebutuhan akan model koordinasi yang efektif menjadi mendesak agar potensi pariwisata tidak terhambat oleh masalah tata kelola.

PEMBAHASAN

Analisis Umum: Pola Koordinasi Antar-Stakeholder

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar-stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai masih berada pada level koordinasi administratif yang bersifat formalitas, belum berkembang menjadi *collaborative governance* yang efektif. Kondisi ini tampak dari lemahnya integrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), kurangnya komunikasi antaraktor, dan terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan.

Secara konseptual, kondisi tersebut sejalan dengan temuan (Ansell & Gash, 2007) yang menjelaskan bahwa kolaborasi lintas aktor hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan peran, kepercayaan timbal balik, dan kepemimpinan fasilitatif yang memediasi kepentingan bersama. Di Kabupaten Sinjai, kelemahan utamanya terletak pada desain koordinatif yang masih berorientasi vertikal (*command and control*), bukan horizontal berbasis jejaring (*network governance*). Dengan demikian, koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai belum berfungsi sebagai mekanisme integratif yang menyatukan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam satu visi pembangunan berkelanjutan. Pola hubungan antarlembaga cenderung *fragmented governance*, di mana masing-masing aktor menjalankan agenda sendiri tanpa kerangka sinergi yang terarah.

Struktur dan Mekanisme Koordinasi: Antara Regulasi dan Implementasi

Secara normatif, koordinasi diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang RIPPARDA Kabupaten Sinjai, yang menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata. Namun implementasi peraturan tersebut tidak diikuti oleh perangkat kelembagaan yang memadai.

Mursak¹, Juanda Nawawi² & Muh. Tang Abdullah³

Forum koordinasi lintas sektor belum dibentuk secara permanen, dan kegiatan koordinasi masih bersifat insidental, misalnya melalui rapat tahunan atau forum Musrenbang.

Hal ini memperkuat konsep *institutional gap* yang dijelaskan oleh (Hall et al., 2021), yakni perbedaan antara *institutional design* dan *institutional practice*. Meskipun terdapat payung hukum koordinasi, tetapi praktik implementasinya belum disertai dengan mekanisme operasional yang jelas, seperti alur komunikasi, pembagian peran, dan indikator keberhasilan kolaborasi. Akibatnya, koordinasi yang terjadi bersifat administratif, bukan substantif. Pemerintah daerah masih berperan sebagai pengendali tunggal (*dominant actor*), sementara aktor lain seperti komunitas lokal dan pelaku usaha berperan pasif sebagai pelaksana atau penerima kebijakan. Kelemahan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sinjai masih berada pada fase koordinasi *top-down*, belum mencapai bentuk *governance-based coordination* yang lebih partisipatif dan inklusif.

Komunikasi dan Kepercayaan Antar-Stakeholder

Kualitas komunikasi antar-stakeholder di Kabupaten Sinjai dinilai masih moderat dengan skor efektivitas rata-rata 3,15 (kategori sedang). Artinya, komunikasi antar-aktor berlangsung tetapi belum efektif untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Banyak informan dari komunitas lokal menyebutkan bahwa keterlibatan mereka masih bersifat simbolik (*tokenism*), di mana partisipasi hanya dilakukan pada tahap sosialisasi, bukan perencanaan. Kondisi ini memperkuat teori Social Capital (Putnam, 1993) yang menekankan pentingnya kepercayaan sosial (*trust*) dan jaringan (*network*) sebagai fondasi kolaborasi. Ketika kepercayaan tidak terbentuk, maka koordinasi hanya bersifat transaksional, bukan transformasional.

Dalam hal ini, komunikasi publik perlu diarahkan pada *dialog kebijakan (policy dialogue)* yang bersifat dua arah, bukan sekadar penyampaian informasi. Seperti dijelaskan oleh (Emerson & Nabatchi, 2015) dalam model *Integrative Framework for Collaborative Governance*, komunikasi yang terbuka mendorong *shared understanding* antar-aktor, yang pada akhirnya memperkuat *joint action* dalam implementasi kebijakan.

Sinergi Program dan Integrasi Sumber Daya

Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 40% program pariwisata di Kabupaten Sinjai yang melibatkan kerja sama lintas lembaga. Sebagian besar program masih bersifat sektoral dan berorientasi proyek jangka pendek. Hal ini menandakan belum adanya mekanisme perencanaan terpadu (*integrated planning*) antarinstansi pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi *whole-of-government approach*, di mana setiap sektor bekerja dengan visi dan indikator kinerja yang berbeda. Padahal, pengembangan pariwisata memerlukan *policy coherence*, yakni keselarasan kebijakan lintas sektor seperti infrastruktur, lingkungan, kebudayaan, dan ekonomi lokal.

Fenomena ini sejalan dengan temuan (Bramwell & Lane, 2022) yang menjelaskan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak hanya tergantung pada inovasi destinasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah mengorkestrasi berbagai sumber daya lintas sektor. Sinergi sumber daya yang lemah menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Dengan demikian, upaya ke depan harus diarahkan pada pembentukan platform koordinasi lintas sektor yang memfasilitasi pertemuan rutin, perencanaan bersama, dan sistem monitoring integratif. Hal ini penting untuk memastikan setiap aktor memahami posisi dan kontribusinya dalam ekosistem pariwisata daerah.

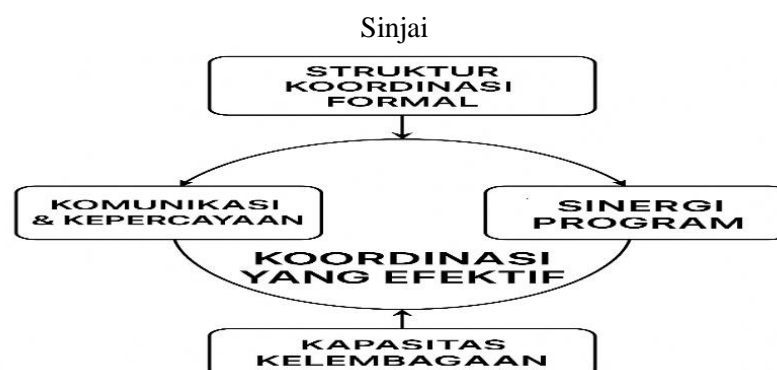
Kapasitas Institusional dan Kepemimpinan Kolaboratif

Koordinasi antar-stakeholder tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kapasitas institusional dan kepemimpinan kolaboratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai masih terbatas baik secara kuantitatif maupun kompetensi teknis. Di sisi lain, perangkat desa wisata dan kelompok sadar wisata belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan program pariwisata tidak berjalan optimal. Banyak kegiatan bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang berkelanjutan. Lemahnya kapasitas institusional berdampak pada minimnya kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar wisata modern yang menuntut digitalisasi dan promosi terpadu.

Selain kapasitas, faktor kepemimpinan kolaboratif juga memainkan peran sentral. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinilai sudah memiliki orientasi kolaboratif, namun belum diimbangi oleh kepemimpinan *horizontal* di lintas OPD. Artinya, koordinasi masih bergantung pada figur tertentu, bukan pada sistem kelembagaan. Hal ini mengonfirmasi teori Network Governance (Provan & Kenis, 2008), yang menyebut bahwa keberhasilan koordinasi dalam jaringan ditentukan oleh keseimbangan antara *centralized coordination* dan *distributed leadership*. Tanpa kepemimpinan kolaboratif yang mendorong partisipasi lintas sektor, jaringan akan rapuh dan tidak berkelanjutan.

Model Tematik Koordinasi di Kabupaten Sinjai

Gambar 1. Model Tematik Kordinasi Antar Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kab.



Hubungan antar-komponen bersifat siklis: struktur koordinasi menjadi fondasi, komunikasi menjadi penghubung, sinergi menjadi mekanisme operasional, dan kapasitas menjadi faktor penguat.

Mursak¹, Juanda Nawawi² & Muh. Tang Abdullah³

Bila salah satu komponen lemah, maka koordinasi tidak dapat mencapai efektivitas. Model ini mendukung pendekatan *Collaborative Governance Framework* (Ansell & Gash, 2007) sekaligus memperkaya teori tersebut dengan konteks lokal pemerintahan daerah di Indonesia, di mana faktor birokrasi dan budaya hierarkis masih kuat.

Oleh karena itu, model koordinasi yang sesuai untuk Koordinasi antara Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sinjai adalah model *semi-hybrid*, yakni perpaduan antara koordinasi formal pemerintahan dan kolaborasi jejaring komunitas. Model ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sekaligus menjaga legitimasi administratif.

Implikasi Akademik dan Praktis

- 1. Implikasi Akademik**, temuan penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik khususnya pada tema *governance in tourism development*, dengan menekankan bahwa koordinasi antar-stakeholder di tingkat daerah tidak cukup dipahami sebagai hubungan struktural, melainkan sebagai proses sosial dan komunikasi politik yang dinamis. Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi pendekatan *Collaborative Governance* dalam konteks birokrasi Indonesia yang sedang bertransformasi menuju *networked public management*.
- 2. Implikasi Praktis**, secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk merancang kebijakan koordinasi yang lebih partisipatif. Diperlukan pembentukan Forum Kolaborasi Pariwisata Sinjai (FKPS) yang berfungsi sebagai wadah komunikasi lintas aktor secara permanen. Forum ini dapat memfasilitasi pertemuan rutin, menyusun *shared agenda*, dan memastikan setiap program pariwisata memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut:

1. Koordinasi antar-stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai masih bersifat formalitas administratif. Meskipun terdapat kerangka regulatif (RIPPARDA 2020-2026), pelaksanaannya belum diikuti oleh mekanisme koordinasi yang efektif lintas lembaga dan sektor.
2. Komunikasi antar aktor masih terbatas dan belum membangun kepercayaan sosial yang kuat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan cenderung bersifat simbolik, sehingga belum menciptakan kolaborasi sejati antara pemerintah, swasta, dan komunitas.
3. Sinergi program dan sumber daya belum optimal. Sebagian besar kegiatan pariwisata masih bersifat sektoral, tanpa integrasi lintas OPD, pelaku usaha, dan lembaga sosial. Hal ini menghambat efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah.

4. Kapasitas institusional dan kepemimpinan kolaboratif menjadi determinan utama keberhasilan koordinasi. Lemahnya kapasitas teknis dan minimnya kepemimpinan lintas sektor menyebabkan koordinasi belum mampu mencapai efektivitas yang diharapkan.
5. Model koordinasi yang ideal bagi Kabupaten Sinjai adalah model *semi-hybrid*, yaitu perpaduan antara koordinasi formal pemerintahan dan kolaborasi berbasis jejaring komunitas. Model ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara legitimasi struktural dan fleksibilitas partisipatif.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai bukan hanya bergantung pada potensi alam, tetapi pada kemampuan semua stakeholder untuk berkoordinasi secara kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan. Koordinasi bukan sekadar forum administratif, melainkan proses sosial-politik yang menuntut kepercayaan, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan lintas sektor. Dengan memperkuat koordinasi antar-stakeholder melalui mekanisme kolaboratif, Kabupaten Sinjai memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan simbol tata kelola publik yang inklusif di Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2022). Sustainable tourism governance: A review. *Journal of Sustainable Tourism*, 30, 1503–1523.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*. Sage.
- Emerson, T., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Folke, C., Österblom, H., Schlüter, M., & al., et. (2021). Social-ecological resilience in the Anthropocene. *Annual Review of Environment and Resources*, 46, 1–28.
- Hall, C. M., Prayag, G., & Amore, A. (2021). Tourism Resilience and Recovery: Reading, Writing and Practicing. *Channel View Publications*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Sinjai, B. P. S. K. (2024). *Sinjai dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sinjai.
- Sinjai, D. P. dan K. K. (2024). *Laporan Statistik Kunjungan Wisata 2023–2024*. Pemkab Sinjai.
- Sinjai, P. K. (2023). *RIPPARDA Kabupaten Sinjai 2023–2038*. Pemkab Sinjai.
- Utama, I. G. B. R., & Rahmawati, S. (2022). Human resource capacity building in tourism village development. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 12(1), 45–60.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage.